

## Kewirausahaan Pribumi dan Kegagalan Suksesi: Pelajaran dari Perusahaan Rokok Keluarga Nitisemito di Kudus

R. Soeharso

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang  
Sekaran, Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah – Indonesia

\*Penulis korespondensi: harsohapsoro@mail.unnes.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.14710/jscl.v10i1.73489>

Diterima/ *Received*: 22 Mei 2025; Direvisi/ *Revised*: 15 Desember 2025; Disetujui/ *Accepted*: 31 Desember 2025

### Abstract

*Nitisemito was one of the indigenous entrepreneurs who successfully established a modern kretek cigarette industry in Kudus during the colonial era. Through the adoption of modern machinery technology, innovative marketing strategies, and large-scale labor management, the Cap Bal Tiga cigarette company grew into a giant in the cigarette industry of its time. Due to this company, Nititsemoto's name has been enshrined as a symbol of indigenous entrepreneurship in the early 20th century. Nititsemoto's success in managing his family cigarette industry demonstrates the potential emergence of an indigenous bourgeoisie amid a colonial economic structure that tended to hinder the growth of local entrepreneurs. However, the sustainability of this business experienced a decline in subsequent periods. This study aims to examine the process of the emergence of Nititsemoto's business empire while explaining the factors underlying its collapse after the founder's death in 1953. This research employs historical methods, encompassing heuristic stages, source criticism, interpretation, and historiography. Historical data were obtained from archives, written sources, and interviews with Nititsemoto's heirs. The results of this study indicate that the company's decline was not solely caused by changes in post-colonial economic conditions but also by internal family issues. These internal conflicts primarily related to leadership succession problems, the absence of an institutionalized management system, and tensions in relations among core family members and the extended family. This situation was further complicated by colonial political pressures on indigenous entrepreneurs and the lack of structural support for the sustainability of the Nititsemoto family cigarette industry. The collapse of Nititsemoto's business exemplifies the failure to form an indigenous bourgeoisie in Indonesian economic history.*

**Keywords:** Bourgeoisie; Indigenous Entrepreneurship; Kretek; Nititsemoto; Kudus.

### Abstrak

Nitisemito merupakan salah satu pengusaha pribumi yang berhasil membangun industri rokok kretek modern di Kudus pada masa kolonial. Melalui penggunaan teknologi mesin modern, strategi pemasaran yang inovatif, serta pengelolaan tenaga kerja dalam skala besar, membuat perusahaan rokok Cap Bal Tiga berkembang menjadi raksasa industri rokok di zamannya. Berkat perusahaan ini, nama Nititsemoto diabadikan sebagai simbol kewirausahaan pribumi awal abad ke-20. Keberhasilan Nititsemoto memanajemen industri rokok keluarganya, menunjukkan adanya potensi lahirnya borjuasi pribumi di tengah struktur ekonomi kolonial yang cenderung menghambat pertumbuhan pengusaha lokal. Namun, keberlanjutan usaha ini mengalami kemunduran pada masa-masa berikutnya. Penelitian ini bertujuan menelaah proses munculnya kerajaan bisnis Nititsemoto sekaligus menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi keruntuhannya setelah sang pendiri wafat pada 1953. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi tahapan heuristic, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Data sejarah diperoleh dari arsip, sumber tertulis, serta wawancara ahli waris Nititsemoto. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa kemunduran perusahaan Nititsemoto tidak semata-mata disebabkan oleh perubahan kondisi ekonomi pascakolonial, tetapi juga oleh persoalan internal dalam keluarga. Konflik internal tersebut terutama berkaitan dengan masalah suksesi kepemimpinan, absennya sistem manajemen yang terlembaga, serta ketegangan relasi antaranggota keluarga inti dan keluarga besar. Kondisi ini turut dipersulit oleh tekanan politik kolonial terhadap pengusaha pribumi dan tidak adanya dukungan struktural bagi keberlanjutan industri rokok keluarga Nititsemoto. Keruntuhannya bisnis Nititsemoto mengambarkan kegagalan pembentukan borjuasi pribumi dalam sejarah ekonomi Indonesia.

**Kata Kunci:** Borjuasi; Kewirausahaan Pribumi; Kretek; Nititsemoto; Kudus.

## Pendahuluan

Sejarah bangsa Indonesia pada era kolonial banyak melahirkan pahlawan, cendekiawan, dan sastrawan. Namun, hanya segelintir nama saudagar yang dicatat sebagai bagian integral dari perjuangan kebangsaan Indonesia. Hal ini karena penguasa Hindia Belanda tidak memiliki kepentingan dengan tumbuhnya borjuasi pribumi, yang dikhawatirkan menjadi kekuatan perlawan (Bulkin 1984b). Memasuki paruh abad ke-19, Hindia Belanda ditandai dengan melemahnya peran ekonomi kaum priyayi dan saudagar pribumi, sementara peran pedagang Cina justru semakin menonjol (Bulkin 1984a).

Seperti dicatat Richard Robison (2009) dalam *Indonesia: The Rise of Capital*, para saudagar Cina adalah pedagang pengumpul, leveransir, agen barang impor, penyedia kredit kecil bagi rakyat, serta pengembang industri pengolahan produk pertanian rakyat. Mereka memiliki kemudahan akses terhadap modal dan barang yang lebih besar dibandingkan saudagar pribumi.

Memasuki pertengahan abad ke-19, borjuasi pribumi tetap lemah, meski ekonomi nasional tumbuh pesat dan pengusaha Cina makin kuat (Widiyanta 2010). Kelas menengah pribumi hanya bertumpu pada golongan penguasa birokrat, mulai dari lurah, mantri, asisten wedana, ndoro wedono, hingga patih dan kanjeng bupati (Jati 2016). Di Jawa, di luar Vorstenlanden (daerah inti Kerajaan Mataram), praktis semua bupati dan wedana sudah digaji dan hanya sedikit yang memiliki lungguh, tanah, serta petani yang memiliki kewajiban kepada majikannya. Kebijakan Gubernur Jenderal Raffles (1812–1818) yang memberikan hadiah tanah kepada penguasa pribumi nyaris dihapus seluruhnya (Syafaah 2018).

Celakanya, seperti ditulis Richard Robison (1986), penguasa pribumi sendiri tidak terlalu memperhatikan tanah lungguh. Mereka lebih nyaman menerima gaji, ditambah tip pajak dan komisi dari perdagangan hasil bumi. Bagi mereka, mengurus orang lebih mulia dibandingkan melakoni dunia bisnis. Akibatnya, mereka tidak memiliki banyak aset, dan anak cucu mereka pun enggan berdagang. Mereka lebih memilih jalur

profesional di pemerintahan Hindia Belanda untuk mengakumulasi modal (Wibowo 2011).

Mereka yang gigih terus berdagang adalah saudagar pribumi Muslim. Mereka kemudian menghimpun diri dalam Sarekat Dagang Islam pada 1912, membangun koperasi, serta menyerukan pemboikotan produk-produk Cina (Nurjanah & Saputra 2021). Persekutuan ini dimotori tokoh-tokoh seperti Haji Samanhudi, H.O.S. Tjokroaminoto, dan sejumlah tokoh lain, umumnya dari kalangan pengusaha tekstil dan batik. Namun, hingga Belanda angkat kaki, para pengusaha pribumi ini belum sempat memperkuat diri dengan mesin-mesin modern. Usaha mereka masih tergolong tradisional (Jahar 2015).

Meskipun telah membangun jaringan dagang dan koperasi, para saudagar pribumi Muslim menghadapi berbagai kendala yang membatasi perkembangan usaha mereka. Keterbatasan modal, kurangnya akses teknologi modern, serta tekanan dari penguasa kolonial dan dominasi pengusaha Cina membuat mereka sulit berinovasi dan memperbesar skala bisnis. Sebagian besar usaha mereka masih berjalan secara tradisional dan belum mampu bersaing secara efektif di pasar yang semakin kompetitif. Namun, di tengah keterbatasan tersebut, muncul tokoh pengusaha pribumi yang berhasil memanfaatkan teknologi modern dan strategi bisnis lebih maju.

Salah satu yang berhasil keluar dari tekanan penguasa kolonial dan pengusaha Cina adalah Nitisemito. Saudagar yang dijuluki "Raja Kretek" dari Kota Kudus ini berhasil membangun bisnis rokok kreteknya dengan mesin modern (Akhmad & Yuliati 2022). Nitisemito merupakan contoh sukses *entrepreneur* Indonesia pada masa penjajahan dan juga terlibat dalam perjuangan kebangsaan Indonesia (1908–1945) (Kurniawan et al. 2019). Tidak mengherankan, dalam Pidato 1 Juni tentang Pancasila di sidang BPUPKI, Bung Karno beberapa kali menyebut nama Nitisemito sebagai contoh bahwa orang Indonesia bisa berhasil dengan usaha dan pikirannya sendiri (Nitisemito 1980). Pada 1934, ia mempekerjakan hampir 10.000 orang (Post 1996).

Castles (1967) menyebut *entrepreneur* di Kudus sebagai kasus khusus, sekaligus sebagai salah satu sebab keterbatasan pengusaha santri dalam bersaing dengan pengusaha Cina. Bentuk

kegagalan lainnya adalah sulitnya pengusaha santri mengantisipasi masalah politik yang muncul. Namun, ramalan Lance Castles yang mengisyaratkan bahwa ekonomi pengusaha santri akan segera habis tidak terbukti. Oleh karena itu, penelitian Castles perlu dilengkapi dengan studi lain yang menekankan lahirnya kepribadian pengusaha.

Meskipun demikian, melakukan studi tentang masyarakat Kudus tanpa menggunakan buku Castles (1967) sebagai referensi adalah kelalaian, karena karya tersebut lebih awal dan telah merangkum banyak permasalahan. Ada pengamat lain, Burger (1983), yang dapat dibandingkan dengan Geertz. Geertz dalam berbagai kajiannya mengamati kemunduran pedagang Jawa karena tidak adanya tradisi membentuk persekutuan dagang semacam gilda di Italia utara abad ke-11. Burger melihat adanya faktor sejarah yang membuat sistem perdagangan pribumi lemah, karena peran Cina sebagai perantara antara kepentingan pribumi dan Belanda. Akibatnya, perdagangan dan industri pribumi Jawa menjadi lumpuh, atau paling tidak terbatas pada pedagang kecil dan pengrajin dengan produksi tidak tetap.

Studi Nakamura (2012) di Kota Gede menunjukkan karakter tersendiri. Reformisme Islam lahir di masyarakat yang sebelumnya bersifat sinkretis. Sebelum Muhammadiyah hadir, para pedagang di sana bukan santri. Namun terjadi proses simetris antara pertumbuhan kewirausahaan pribumi dan reformisme Islam sebelum pecah perang.

Proses ini berakhir saat jatuhnya kolonialisme Belanda pada 1942. Perang revolusi serta kekacauan politik dan ekonomi menghilangkan kesempatan para *entrepreneur* merebut kembali kekuatan ekonomi sebelum revolusi. Karenanya, Islam tidak membawa keseragaman bentuk di Indonesia. Jonge (1989), dalam penelitian di Madura (Oktober 1976–September 1977), menggunakan pendekatan mikro dalam antropologi ekonomi untuk menelaah peran pedagang dalam komersialisasi, khususnya setelah Madura dibuka untuk dunia luar pada paruh kedua abad ke-19, dengan fokus pada pedagang tembakau.

Seperti Castles (1967), penelitian mengenai industri kretek di Kudus pada 1960-an menunjukkan bahwa perusahaan pribumi sebagian besar adalah perusahaan keluarga dan belum berbentuk organisasi ekonomi yang lebih kompleks. Oleh karena itu, hubungan keluarga sangat menentukan. Sebaliknya, kajian terbaru Prayoga et al. (2025) menelaah secara rinci strategi produksi, manajemen, inovasi pemasaran, serta cara Nitisemito menghadapi dominasi bisnis asing pada masa kolonial. Studi ini menekankan proses munculnya perusahaan keluarga rokok kretek yang didirikan Nitisemito hingga berkembang menjadi salah satu perusahaan terbesar dan paling terkenal pada masanya. Penelitian ini juga menelaah karakter dan kepemimpinan Nitisemito yang mampu membawa perusahaan rokok kretek Cap Bal Tiga mencapai puncak kejayaan. Pertanyaan utama yang ingin dijawab adalah bagaimana perusahaan keluarga Bal Tiga mengalami keruntuhan pada awal abad ke-20 dan mengapa tidak terjadi suksesi atau alih generasi sehingga perusahaan tersebut tidak dapat bertahan dan dilanjutkan oleh generasi penerus.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah munculnya perusahaan keluarga rokok kretek yang didirikan oleh Nitisemito hingga menjadi perusahaan yang sangat besar dan terkenal, serta mendeskripsikan pribadi Nitisemito yang mampu membawa perusahaan keluarga rokok kretek Cap Bal Tiga menjadi perusahaan besar dan terkenal tersebut. Selain itu, tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui sejarah keruntuhan kerajaan rokok Nitisemito dan proses suksesi atau alih generasi, yaitu bagaimana perusahaan diteruskan dengan dialihkan kepemilikannya kepada generasi berikutnya, terutama keluarga inti (*nuclear family*) maupun keluarga besar (*extended family*).

## Metode

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode sebagai alat kerja untuk mendekati objek yang akan diteliti. Metode sejarah dipilih karena merupakan proses untuk menguji rekaman-rekaman masa lampau (Gottschalk 2006). Proses penelitian sejarah melibatkan beberapa tahapan

utama, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

Tahap awal adalah heuristik, yaitu upaya untuk mencari dan menghimpun jejak-jejak masa lampau melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, majalah, arsip, dan dokumen lainnya. Penulis mengakses berbagai perpustakaan, antara lain Perpustakaan Wilayah Semarang, Perpustakaan Daerah Kabupaten Kudus, dan Perpustakaan UNNES Semarang, untuk memperoleh referensi yang relevan mengenai kehidupan Nitisemito. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan dokumen dan arsip kegiatan Museum Kretek Kudus, serta buletin dan majalah seperti *Tempo* dan surat kabar *Kompas* yang pernah memuat informasi tentang Nitisemito.

Observasi dilakukan dengan mengamati langsung peninggalan Nitisemito untuk memperoleh gambaran nyata mengenai jejak sejarah yang ditinggalkannya. Peneliti melakukan kunjungan lapangan ke bangunan Rumah Kembar Nitisemito serta Museum Kretek Kudus, yang merupakan bagian penting dari warisan sejarah tersebut.

Selanjutnya, wawancara digunakan sebagai metode untuk memperoleh data langsung dari informan. Data yang diperoleh dari wawancara melengkapi informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau studi pustaka. Informan dalam penelitian ini terdiri atas staf Museum Kretek Kudus, anggota keluarga Nitisemito, dan tokoh-tokoh industri rokok kretek di Kudus. Meskipun wawancara memberikan informasi penting, peneliti tetap melakukan verifikasi terhadap setiap keterangan untuk memastikan keobjektivasannya. Kebenaran informasi diuji dengan mencocokkannya dengan kondisi nyata di lapangan. Jika terdapat kesesuaian, informasi tersebut digunakan sebagai sumber penelitian. Dalam proses wawancara, peneliti terlebih dahulu menentukan informan, menyusun daftar pertanyaan, menghubungi informan, dan kemudian melaksanakan wawancara, baik melalui rekaman maupun catatan tertulis.

Tahap selanjutnya adalah kritik sumber, yaitu proses menilai dan menyaring sumber-sumber yang telah dikumpulkan pada tahap

heuristik agar diperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kritik sumber dibagi menjadi dua, yaitu kritik intern dan kritik ekstern.

Kritik intern berfokus pada isi atau substansi informasi, dengan menilai kebenaran dan relevansi sumber terhadap permasalahan yang diteliti. Peneliti menilai apakah pengarang sumber dapat dipercaya, memiliki kapasitas untuk menyampaikan informasi yang benar, dan tidak memiliki kepentingan subjektif terhadap peristiwa yang diceritakan. Selain itu, dilakukan perbandingan antar-sumber yang tidak saling berkaitan untuk memastikan konsistensi data.

Kritik ekstern dilakukan sebelum kritik intern dan bertujuan untuk memastikan keaslian sumber. Analisis ini mencakup pemeriksaan terhadap bentuk fisik dan asal-usul sumber. Pertanyaan utama dalam kritik ekstern adalah apakah sumber tersebut benar-benar yang dicari, apakah sumber tersebut asli atau hanya salinan, dan apakah sumber tersebut masih utuh atau telah mengalami perubahan. Menurut Gottschalk (2006), kritik ekstern sangat penting dalam membuktikan keotentikan sumber sejarah.

Setelah proses kritik, langkah berikutnya adalah interpretasi, yaitu upaya memahami dan menghubungkan fakta-fakta yang telah dikumpulkan. Peneliti menetapkan makna dan keterkaitan antara fakta agar membentuk rangkaian cerita yang logis dan bermakna. Tidak semua fakta dimasukkan, hanya yang relevan dengan fokus penelitian. Interpretasi ini menjadi dasar untuk menyusun kisah sejarah yang utuh.

Tahap terakhir dari metode sejarah adalah historiografi, yaitu penyusunan hasil penelitian dalam bentuk narasi sejarah. Dalam tahap ini, peneliti merangkai hasil interpretasi menjadi tulisan yang terstruktur dan koheren. Penulisan historiografi membutuhkan keterampilan dalam menjaga alur cerita sejarah melalui prinsip-prinsip seperti kronologi, kausalitas, dan kemampuan imajinasi, sehingga kisah sejarah terasa hidup namun tetap berdasarkan fakta.

### **Bisnis Keluarga Nitisemito**

Materi kemasan Bal Tigaeng sengaja di cetak di Jepang agar bagus dan memakai label full color. Hal demikian tidak pernah terjadi sebelumnya pada

produk apapun di Indonesia (Nurwanti 2009). Selain Bal tiga, tercatat merek lain yang muncul bersamaan di Kudus pada 1913, yakni Goenoeng dan Klapa yang di buat M. Atmowijoyo yang tidak mengubah bisnisnya menjadi sebuah industri seperti yang dilakukan oleh Nitisemito. Hingga saat ini, di tangan generasi kelima keluarga Atmowijoyo, perusahaan yang memproduksi merek Goenoeng & Klapa itu masih membuat rokok klobot. Rokok tersebut di buat dengan tangan menggunakan tali rami untuk mengemasnya (Supratno 2023).

Sementara pada 1920, Nitisemito semakin dikenal dan reputasinya membuat Raja Jawa di Surakarta menaruh perhatian kepadanya. Pada waktu itu, Perusahaannya telah melakukan sistem pemasaran dengan sistem promosi berhadiah atau merchan dising. Konsumen pada saat itu bisa menukarkan bungkus kosong Bal Tiga dengan hadiah hadiah menarik, antara lain sepeda, jam sampai tea set dan berbagai peralatan lain rumah tangga bergambar logo bal tiga. Acara promosi. Nitisemito juga menyelenggarakan acara Antara lain menggelar panggung terbuka di pasar pasar malam dan mengisinya dengan pementasan sandiwara. Untuk meluaskan pasar Bal Tiga ke luar kota Kudus dan sekitarnya, acara promosi semacam itu pun digelar di kota-kota lain. Konon pernah terjadi hadiah promosi yang disediakan berupa mobil (Nurwanti 2009).

Sejarah mencatat jalinan Nitisemito dan Nasilah yang kemudian menikah itu merupakan perubahan besar dalam sejarah industri rokok kretek di Indonesia (Hana 2018). Sukses Nitisemito mengilhami munculnya produsen rokok kretek lain di Kudus dan beberapa kota Kudus dan beberapa kota lain di Indonesia. Jasa dan kepeloporan Nitisemito dalam bidang rokok kretek telah di catat oleh sejarah. Namun setelah itu perusahaan rokok kretek Bal tiga di guncang masalah. Ada yang menyebut masalah itu muncul karena konflik internal dalam keluarga seputar perebutan putra mahkota sebagai penerus perusahaan. Ada pula yang menyebut di target operasi oleh Belanda karena Nitisemito membela kaum pribumi dan berjiwa nasionalis. Sampai Karmain sebagai penerus dan Nitisemito sempat diadili pengadilan Belanda. Ia dituduh mempraktekkan pembukuan ganda dan

menggelapkan pajak. Setelah 1940-an perusahaan Nitisemito ini kian merosot. Apalagi setelah pendirinya wafat pada 1953. Anak cucunya tidak lagi mampu membangkitkan atau mengembalikan kejayaan Perusahaan Bal tiga yang berdiri di awal abad ke-20 itu (Nurwanti 2009). Maka betul kalau ada pernyataan bahwa perusahaan keluarga adalah sesuatu yang bersifat pribadi dan banyak rencana sukses di dalamnya gagal karena faktor psikologis yang diabaikan. Mencari penerus yang andal dalam perusahaan keluarga adalah satu tantangan berat. Jarang sekali yang bisa bertahan selama dua generasi apalagi sampai generasi ke tiga.

Hal lain yang menarik dan relevan dengan semangat wirausaha Nitisemito apabila dilakukan observasi sekilas pada suku-suku bangsa di Indonesia seakan-akan terdapat kesesuaian antara kedalaman penghayatan terhadap Islam dengan kegairahan dalam kehidupan ekonomi. Setidaknya sampai dengan masa akhir penjajahan Belanda, suku bangsa Banjar, Aceh dan Minangkabau, secara relative tampak lebih menunjukkan adaptasi dalam kehidupan ekonomi kolonial. Demikian juga halnya didominasi oleh system yang kecenderungan pada mereka yang biasa berdiam di sekitar masjid dan pasar di masyarakat Jawa (Abdullah 1982)

Pengusaha-pengusaha industri kretek, batik dan perak adalah mereka yang lebih responsive mengamalkan agama Islam dalam kehidupan pribadi dan sosial sekurang-kurangnya hal ini tampak dari luar. Gagasan Geertz (1960) dalam setiap bukunya tentang etos kerja selalu menyatakan adanya kaitan yang kuat antara unsur duniawi dan unsur rohani. Dalam hubungan ini Geertz menafsirkan adanya keseimbangan antara mengejar kepentingan duniawi dengan nilai kebijakan dalam ajaran Islam. Penafsiran ini justru banyak dijalankan oleh Islam reformis di kalangan pedagang Islam, terutama di pesisir Utara Jawa. Oleh karena itu konsepsi dari Clifford Geertz membenarkan adanya hubungan historis dan fungsional antara Islam dengan perdagangan. Pendapat-pendapat ini terutama termuat dalam bukunya "Mojokuto".

Di Mojokuto, muncul suatu proses pertumbuhan dan nilai-nilai baru semacam etnic yang pernah dikemukakan oleh Weber (2006), yang memberikan keleluasaan pada ekonomi yang

lebih nasional, untuk memainkan peranan dalam pembangunan ekonomi di Kudus Kulon, sehingga Mojokuto memang dijadikan setting (latar) atau subyek lain karena temuan Geertz adalah Lance Castle yang dipandang melahirkan karya yang cukup spektakuler dan cukup memadai untuk disejajarkan dengan karya di atas. Seperti yang tampak dalam bukunya yang sukses tentang Kudus. Castles (1967), meneliti tentang pertumbuhan kelas menengah Jawa dengan mengambil kasus industri rokok kretek di Kudus. Castles mengkaji kelas menengah yang gagal mengadakan reformasi karena tidak sanggup menghadapi tantangan struktur masyarakat Jawa. Hal semacam ini digambarkan Castles sebagai kondisi umum yaitu suatu potret masyarakat Jawa yang hanya mengenal system dua kelas (kawula dan gusti), sehingga sulit untuk menerima kelas menengah hadir dalam masyarakat Jawa.

Kiranya penelitian Castles akan lebih sempurna apabila penelitian yang lebih lanjut menggunakan pendekatan sejarah yang prosesual di dalam mengkajinya dari sini akan diketahui secara awal munculnya kondisi semacam itu. Penelitian ini memang menyangkut pula tentang perilaku ekonomi yang tumbuh karena nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan variable-variabel lain yang ikut mempengaruhinya.

Jonge (1989), menyaksikan parindu dan lokasi-lokasi disekitarnya sebagai pintu masuk dalam sistem *network market* (jaringan pasar) yang berskala nasional maupun internasional. Bentuk transaksi yang dikuasai komoditi berkemampuan untuk mendorong perubahan-perubahan baik di tembakau temyata sektor ekonomi maupun pada sektor non ekonomi. Yang menarik adalah ada keterkaitan antara pedagang tembakau dengan menguatnya kedudukan agama Islam. Dalam proses ini maka kelihatan bahwa agama Islam identik dengan perdagangan. Melalui gerakan keagamaan para pedagang mendapat doktrin-doktrin yang memberi aksentuasi bahwa usaha ekonomi itu sangat dianjurkan Tuhan Yang Maha Esa. Akibat dari ini adalah status pekerjaan yang semula tidak begitu dihargai oleh masyarakat menjadi keadaan yang terhormat. Dan kebalikan dan keberhasilan perdagangan tembakau dan ada hubungan yang berarti antara agama Islam dengan keberhasilan perdagangan di sana. Maka de Jonge

menyimpulkan bahwa hasil penelitiannya telah memperkuat hipotesis Geertz. Pada penelitiannya de Jonge menampakkan kemiripan dengan penelitian Castles (1967). Pada penelitiannya Castle menekankan kehidupan pengusaha yang ada di kota, sedangkan de Jonge pada mereka yang ada di pedesaan. Latarbelakang keduanya sama-sama didasari perilaku keagamaan penelitian itu masyarakat.

Ada penelitian lagi yang perlu disinggung sebagai tinjauan beberapa studi, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Soedarmono (1987) ketika menyusun tesis di Jurusan Sejarah Universitas Gajah Mada, dia mengamati tentang munculnya kelompok-kelompok pengusaha batik di Laweyan pada awal abad ke-20. Soedarmono (1987), mengamati sejarah sosial ekonomi kelompok pengusaha batik, yang terus berproses berlangsung sejak awal abad ini sampai masa kemerdekaan Indonesia. Penelitiannya dipusatkan di sebuah kampung Jawa Laweyan di Surakarta, yang memiliki identitas sebagai perkampungan saudagar. Karakteristiknya sangat berbeda dengan kampung-kampung lain di Surakarta, karena itu masyarakat Surakarta menyebut daerah itu sebagai kampung dagang. Studinya mencoba menyajikan proses perkembangan masyarakat pengusaha itu berada di dalam dua komunitas sosial yang lebih besar: birokrat kerajaan dan rakyat. Permasalahan yang menarik dan studi Soedarmono itu adalah keterikatan antara senantiasa mengikuti model gaya hidupnya priyai istana. naiknya status social mereka dengan persepsi kulturalnya yang Berhubungan dengan masalah itu Soedarmono mengatakan bahwa kelompok pengusaha itu tidak dapat dikategorikan ke dalam kelas pengusaha dan kelas rakyat. Maka tesisnya ini berlainan dengan tesisnya Castles (1967), juga etos kerja masyarakat Laweyan ternyata tidak tumbuh dan masyarakat Islam tetapi abangan. Maka penelitiannya ini tidak sejalan dengan apa yang pernah di kemukakan oleh Geertz. Demikian pula tesisnya Burger bahwa kelas menengah akan diambil alih oleh kelompok Cina tidak berlaku di Laweyan.

Walaupun begitu dalam kenyataan yang muncul di lapangan, etos kerja masyarakat lahir banyak dipengaruhi oleh agama, ini telah tampak pada penelitiannya (Geertz 1960), Castles (1967), (Jonge 1989), dan ada lagi yang menyatakan

demikian, yaitu Nakamura (2012), juga Sobary (2007). Pada penelitiannya, Sobary (2007) mempertanyakan kaitan antara tindakan sosial dengan sikap dan kesadaran agamis tertentu yang ada dalam diri masyarakat. Dan dengan cara lain dapat dikatakan bagaimana kaitannya etos kerja dan tingkah laku masyarakat.

Pada pembahasan terakhir dalam penelitiannya Sobary (2007) mengatakan bahwa, pemahaman atas suatu doktrin keagamaan dengan memberi arti sekuler terhadap bentuk-bentuk ritualnya yang sakral mencerminkan bahwa citra ideal dalam doktrin tersebut tidak lagi memiliki jarak dengan pelakunya. Citra ideal itu jadinya telah menyatu dan menjadi bagian dan identitas diri. Dengan demikian ini mungkin telah mampu berfungsi sebagai pendorong diri dalam bagi tindakan-tindakan sosial penting dalam kehidupan pelakunya. Pandangan bahwa keselamatan di akherat bisa dicapai hanya jika kita selamat di dunia sekarang, secara implicit menunjukkan bahwa dunia merupakan bagian yang harus dikejar, keadaan.

Kondisi mikro yang tidak memungkinkan tokoh pengusaha untuk muncul secara spektakuler ternyata telah menjadi tantangan tersendiri bagi sekelompok masyarakat yang dulunya pernah sukses. Seperti diketahui keadaan yang unik di masyarakat Kudus adalah mereka lebih dahulu mengalami perubahan dalam pembangunan ekonominya yang pada intinya ide pembangunan mengharuskan adanya perubahan watak manusia, suatu perubahan yang merupakan alat untuk mencapai tujuan berupa pertumbuhan yang lebih lanjut lagi. Bersamaan dengan itu juga merupakan tujuan besar proses pembangunan itu sendiri. Perubahan yang paling besar bagi masyarakat Kudus adalah semenjak kedatangan Sunan Kudus.

Fase-fase perubahan ini yang membuat masyarakat menyikapi perilaku kulturalnya. Keinginan untuk mempertahankan “status” membuat masyarakat berusaha menyiapkan generasi berikutnya. Pada keadaan secara umum orang tua di Kudus jaman sekarang sering mengeluh mereka seakan dituntut untuk mempersiapkan segalanya demi masa depan anak-anak, sesungguhnya inilah fenomena masa transisi yang layak dijadikan studi dalam kehidupan keluarga dan tampak sekali di masyarakat Kudus

ada kaitan berwirasuaha yang didasari pengalaman agama. Kejadian struktural semacam ini juga mempengaruhi regenerasi dalam perusahaan rokok kretek Bal Tiga Nitisemito.

### Kelas Menengah Muslim

Memasuki pertengahan abad ke-19, meskipun ekonomi kolonial berkembang pesat, kelas borjuasi pribumi tetap stagnan. Kelas menengah pribumi hanya terdiri dari kalangan birokrat seperti lurah, mantri, asisten wedono, hingga bupati (Jati 2016). Di luar wilayah kerajaan Mataram (Vorstenlanden), para bupati sepenuhnya berada di bawah kendali Belanda. Sebagian besar bupati dan wedana digaji dan hanya memiliki sedikit tanah lungguh. Kebijakan Raffles yang dahulu memberikan tanah kepada penguasa lokal telah dihapus hampir sepenuhnya (Syafaah 2018).

Menurut Richard Robinson, penguasa pribumi tidak terlalu peduli dengan tanah karena lebih senang menerima gaji dan keuntungan dari pajak serta perdagangan. Mereka menganggap mengurus rakyat lebih mulia daripada berdagang. Akibatnya, banyak priyayi dan keturunannya enggan berbisnis dan lebih memilih karir profesional atau pemerintahan kolonial, sedangkan yang terus gigih berniaga adalah “Bourgeoisie” saudagar pribumi muslin. Mereka kemudian menghimpun diri dalam Sarekat Dagang Islam pada 1912, dan membangun koperasi serta menyerukan pemboikotan atas produk-produk Cina. Sarikat ini dimotori tokoh-tokoh seperti Haji Samanhudi, H.O.S Cokroaminoto, dan sejumlah tokoh lain yang umumnya dari kalangan pengusaha tekstil dan batik. Namun hingga Belanda angkat kaki, para pengusaha pribumi itu belum sempat memperkuat diri dengan mesin-mesin modern. Usaha mereka masih tergolong tradisional (Kuntowijoyo 1985).

Kalaupun ada tokoh yang keluar dari impitan penguasa kulit putih dan penguasa Cina, ia adalah Nitisemito, saudagar asal kota Kudus tepatnya Kudus Kulon Jawa Tengah. Nitisemito berhasil membangun bisnis rokok kreteknya dengan mesin modern. Pada 1920-an ia memiliki buruh hampir 10.000 orang. Nitisemito wirausahawan pribumi pertama yang mempromosikan rokoknya bermerk “Bal Tiga”

dengan banner yang ditarik pesawat terbang di Semarang saat itu (Nitisemito 1980).

Nitisemito yang memiliki etos kerja yang hebat berasal dari kota Kudus Kulon. Masyarakat Kudus kulon sejak jaman dulu telah bergerak di bidang perdagangan, sejarah telah mencatat bahwa mereka merupakan komunitas kelas menengah pedagang muslin yang telah mandiri semenjak sebelum kolonial datang di Indonesia (Graaf 1985 ; Castles 1967).

Hingga Indonesia merdeka, 1945, Indonesia tidak memiliki borjuasi pribumi yang kuat. Maka eksperimen ekonomi oleh rezim politik berjalan leluasa. Agenda ekonomi sudah berubah dan tanpa kontinuitas tidak ada kelas menengah pribumi sebagai penyeimbang dan saudagar cina hanya berkiprah di bidang bisnis (Sonhaji & Maulida 2020).

Di balik itu, lebih dari lima dasawarsa yang lalu saat mengamati gejala kelas pengusaha santri di Mojokuto salah satu kota kecil di lembah sungai Berantas, Clifford Geertz telah menghidupkan kembali diskusi tentang peranan keberadaan kelas menengah Muslim di Indonesia (borjuis pribumi). Menurut Geertz (1986) kelompok Islam santri inilah yang paling potensial dan memiliki nilai-nilai tertentu untuk mengembangkan diri menjadi golongan entrepreneur yang ulet dan mandiri. Golongan ini diharapkan menjadi inti kelas menengah yang amat diperlukan untuk pembangunan, pembaharuan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan. Sebetulnya tidak hanya di Mojokuto, di setiap kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur terdapat kalangan pengrajin pedagang pribumi yang terpusat di Kauman, mereka rata-rata berbeda dengan masyarakat pada umumnya (Alie & Suwandono 2013). Kelebihan dan ketaatan beragaman yang sangat rajin dan ulet apabila dibandingkan dengan penduduk pada ekslusif ini rata-rata bergerak di bidang industri batik, kretek, dan kerajinan perak (Muttaqin 2011).

Peranan kelas menengah muslim ini menonjol dan membentuk konfigurasi sosial budaya setempat yang agak menyimpang dari dominasi pegawai negeri atau priyayi pada umumnya (Muttaqin 2011). Bagi Geertz, dalam karyanya "Peddlers and Princess: Social Change and Economic Modernization in Two Indonesia Town" (1963) ada hubungan antara pengalaman

beragama dari santri itu dengan tingkah laku ekonomi sehingga lama kelamaan pengaruh mereka secara ekonomi dapat menyebar dari kaum yang ekslusif ke arah masyarakat pada umumnya hal seperti ini terjadi di Kota Kudus (Bastomi 2019).

Namun ramalan Geertz tentang sebagian kecil pengusaha kelas menengah muslin akan dapat bertahan dan menjadi sumber bagi kewirausahaan dan ekonomi modern yang akan datang tidak terbukti sama sekali. Kalau kita menengok sejarah masa lalu, perkembangan kelas menengah di Indonesia setelah kemerdekaan adalah dari kelas abangan dan priyayi yang terkooptasi birokrasi negara Orde Baru. Kondisi jaman ekonomi Orde Baru ternyata tidak menguntungkan pengembangan usaha-usaha tradisional kaum santri menjadi industri yang semakin besar, padat modal dan canggih teknologi di samping mulai merebaknya ekonomi rente, juga koluasi nepotisme. Sebagai misal, perusahaan batik tradisional yang tidak dapat bertahan menghadapi kompetisi proses pewarnaan yang baru. Maka dapat dikatakan bahwa hambatan pertumbuhan dan perkembangan usaha kelas menengah muslim ini bukan sekedar nilai kultural yang patrimonial. Sistem Bazaar yang tidak rasional tetapi juga faktor struktural yang tidak memungkinkan golongan santri ini bersaing melawan kekuatan asing multi nasional maupun kekuatan sektor negara dan swasta yang mendapat hak monopoli di masa Orde Baru. Koalisi antara birokrasi Orde Baru dengan kelas menengah industri perdagangan termasuk para Tionghoa terus mewarnai sepanjang sejarah Orde Baru (Muntholib 2008).

Menurut Mahasin (1998), tampaknya ekonomi Bazaar yang diproyeksikan Geertz tidak juga berkembang mengubah dirinya dan mentransformasikan menjadi ekonomi model firma atau CV. Sebaliknya komunitas santri pengusaha (seperti di Kudus Kulon) malah mengirimkan anak laki-laki dan perempuan kesekolah-sekolah modern dan melalui cara itu mereka mendorong mereka masuk ke dalam kelas menengah birokrasi pemerintahan. Dengan demikian menurut Mahasin (1998) yang terjadi bukanlah transformasi dari ekonomi Bazaar ke ekonomi modern melainkan pemborjuisian anak-anak kaum antri atau priyayisasi santri.

Apabila menengok sejarah Orde Baru, kelahiran kelas menengah santri ke kelas menengah birokrasi modern merupakan gejala yang relatif baru. Walaupun mereka juga tidak muncul menjadi memiliki kekuatan politik yang mempunyai basis ekonomi yang kuat. Menurut Mahasin (1998) suatu stratum tengah yang terbentuk dari lapisan rakyat yang mula-mula mereka muncul dari gerakan-gerakan mahasiswa para aktivis mahasiswa menjelang runtuhan Orde Lama namun setengah dekade kemudian mereka tiba-tiba muncul di elit birokrasi menjadi profesional di perguruan tinggi. Mereka bahkan menjadi pejabat di perkotaan menjadi lapisan yang disebut sebagai kaum gajian seperti kaum samurai Jepang yang jauh dari konotasi borjuasi.

Gejala masuknya santri ke sektor-sektor modern begitu mengejutkan. Gejala ini mengaburkan stereotipe lama mengenai sub kultur ini. Dulu mereka digambarkan sebagai anak-anak petani atau pedagang kecil yang muncul dari sistem sosial ekonomi Bazaar yang tradisional dengan ciri-cirinya yang ulet dan hemat (Mughits 2004). Mereka sebenarnya yang mewarisi cita-cita terbentuknya lapisan gigih bersaing di pasar bebas dan tidak akrab dengan birokrasi borjuasi pribumi. Inilah kelompok sosial yang sering digambarkan akan menjadi basis bagi terbentuknya industrialisasi bahkan demokrasi di Indonesia, tetapi gambaran ini seperti diramalkan Geertz (1963) tidak pernah terbukti dan menjadi kenyataan. Komunitas santri tidak pernah muncul sebagai kekuatan borjuasi pribumi. Hingga Indoensia merdeka 1945, Indonesia tidak memiliki borjuasi pribumi yang kuat dan eksis tidak lapuk dimakan usia jaman. Sehingga eksperimen ekonomi oleh rezim politik berjalan lebih leluasa. Agenda ekonomi mudah berubah, tanpa kontinuitas karena tidak ada kelas menengah pribumi yang menjadi penyeimbang saudagar Tionghoa jelas tidak dapat mengambil peran ini (Muntholib 2008).

Mereka, komunitas pedagang, pengrajin, pengusaha pribumi yang pada masa awal abad ke-20 tergabung dalam Sarikat Dagang Islam sering disebut sebagai kelas menengah di Jawa. Sebab kegiatan ekonomi dan politik mereka merupakan pengontrol terhadap pemerintah kolonial dan merupakan perwujudan dari nilai-nilai entrepreneurship dalam arti sebenarnya, tetapi

masa kejayaan kelas menengah ini berakhir seiring jatuhnya kolonialisme Belanda di Indonesia (Aina 2018). Perang, revolusi, dan lintang pukang politik dan ekonomi telah menghilangkan kesempatan para wirausahawan merebut kembali tingkat kekuatan ekonomi kelas menengah ekonomi pribumi di masa lalu.

Barangkali itulah sebabnya, diskursus kelas menengah yang begitu marak sepanjang paruh pertama dekade 1980-an lebih banyak berkonotasi politik. Selalu dalam setiap perbincangan waktu itu kelas menengah selalu ditekankan pada bagian aspek perannya ketimbang dari kriteria-kriteria kelas menengah itu sendiri peran itupun yang dimunculkan selalu bidang politik (Aina 2018).

### Akar Kelas Menengah

Diskursus kelas menengah sebagaimana juga konsep kelas yang telah dikembangkan Karl Marx tidak bisa dilepaskan dari revolusi Industri yang terjadi di Eropa abad ke-17, suatu perubahan sosial dan politik, tetapi sekaligus menjadi awal perkembangan kapitalisme. Pada waktu itu sistem sosial masih bersifat feudal dengan stratifikasi: raja dan keluarga bangsawan berada di puncak piramida sosial, dibawahnya tuan tanah dan para pedagang, dan strata paling bawah adalah rakyat jelata (Yuliati 2018). Ketika revolusi inudtsri mulai mengguncang di Eropa, kelompok kedua itulah yang banyak berperan dalam proses perubahan besar tersebut. Lapisan sosial itu pula yang belakangan disebut sebagai kelas menengah lama atau bourgeoisie. Marx melihat adanya pertentangan kelas (hubungan yang tidak seimbang) antara pemilik modal (kapitalis) dan pekerja (buruh). Ketidaksukaan Marx terhadap kapitalis meskipun Marx sendiri tidak bisa mengingkari keagumannya pada kapitalisme - paralel dengan kebencianya terhadap feudalisme. Nilai-nilai feodal yang diagung-agungkan raja dan kalangan bangsawan waktu itu dilihat Marx tidak lebih dari selubung ideologis kenyataan bahwa masyarakat feodal adalah masyarakat berdasarkan penghisapan manusia atas manusia lainnya. Di balik nilai-nilai feodalisme itu tersembunyi kerakusan atas yang hidup dari keringat, darah dan air mata rakyat jelata (Magnis Suseno 1999).

Ketika revolusi industri yang dilanjutkan dengan meluasnya kapitalisme berkembang semakin pesat dan kompleks, apalagi dengan adanya industri jasa dan tidak lagi memproduksi barang, maka teori Marx soal kelas menjadi agak problematis. Hari demi hari pengelolaan sistem politik, ekonomi, dan suprastruktur ideologi semakin diambil alih oleh munculnya kelas para ahli yang bergaji, manajer, pejabat, teknisi, dan profesional lainnya. Kelas sosial itulah yang kemudian disebut kelas menengah baru. Berbeda (modal) kelas menengah baru tersebut hidup dari gaji yang dengan kelas kapitalis yang hidup dari akumulasi keuntungan diperoleh dari keahlian yang mereka miliki, baik keahlian berdasarkan pendidikan tertentu maupun pengalaman panjang dalam suatu pekerjaan tertentu. Dengan lahirnya kelas sosial ini, maka muncullah percoalan teoritis dari kalangan Marx (Robison 2009).

Itulah sebabnya konsep kelas menengah sebetulnya lebih dekat dengan tradisi Weberian ketimbang Marxian yang mendefinisikan kelas sebagai golongan sosial dalam masyarakat yang ditentukan oleh posisi tertentu dalam proses produksi. Analisa Weber tentang kelas lebih ditekankan pada posisi pasar yang berkaitan dengan hak pemilikan, kesejahteraan dan kesempatan-kesempatan hidup daripada bentuk hubungan terhadap alat-alat produksi karenanya kesejahteraan, pendapatan menjadi faktor yang penting dalam struktur kelas. Weber tidak terlalu memperhatikan masalah konflik kelas tetapi lebih pada transformasi masyarakat dan otoritas politik dari sistem tradisional, patrimonial dan evenang-wenang ke sistem modern, rasional, dan teratur secara legal (Robison 2009).

Menurut Tanter & Young (1996) kelas menengah tidak pernah seragam. bahwa kelas menengah di Eropa memiliki peran yang signifikan dalam proses perubahan dan pembaruan sosial, ekonomi dan politik, hal ini memang sebagian dari faktas ejarah yang memang cukup dominan dalam wacana kelas menengah. Seperti dikatakan tadi kelas menengah memang tidaklah seragam. Mereka kadang-kadang bisa tampil sebagai oportunistis, pejuang hak asasi manusia, atau bahkan sebagai aktivis radikal. Di Indonesia banyak yang berilusi bahwa kelas menengah haruslah seperti di Barat.

Apakah kelas menengah di Indonesia (sebut saja begitu) dapat diharapkan menjadi agen perubahan. Kiranya terlalu dini untuk sekedar menyebutnya, bahwa kelas menengah Indonesia merupakan agen perubahan, apalagi memaksa menyamaratakan dengan yang terjadi di Barat. Kelas menengah di Indonesia sering dicap skeptis pada perubahan, kurang terlibat dalam isu-isu politik, dan tidak memiliki orientasi politik yang tidak begitu jelas. Karena mereka tidak pernah mengakar dalam sejarah perpolitikan di Indonesia. Apalagi pada masa Orde Baru, yang jelas eksistensi mereka senantiasa di topang oleh birokrat dan juga oleh para pengusaha yang sangat pro pada pemerintah (Jati 2015).

Karena itu, dengan skeptis Mahasin (1998) melihat bahwa kelas menengah Indonesia, lebih berpeluang datang dari kalangan keluarga "white Collar", atau dari kalangan priyayi. Mahasin (1998) juga melihat terjadinya proses pemborjuisan anak-anak kaum santri atau priyayisasi santri atas dasar pemisahan trilogi, massa dikota Mojokerto menurut Clifford Geertz yang sangat melegenda itu. Seperti telah diketahui Geertz dalam memahami perkembangan dan perubahan sosial politik Indonesia, menggunakan pendekatan kultural.

### Gagalnya Pembentukan Borjuasi Pribumi

Kolonialisme Belanda di Indonesia eksistensinya didasarkan pada sektor bahan mentah atau barang-barang primer. Tanah dan tenaga kerja untuk memproduksi barang ini diperoleh sebagai pajak langsung yang dikumpulkan oleh pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial menguasai seluruh tanah yang ada. Baru pada 1870 dikeluarkan Undang-undang yang memberi izin tanah perkebunan disewakan pada pihak swasta (Mutiarra & Purwaningsih 2016). Terjadi semacam dualisme dalam sektor pertanian: di satu pihak ada sektor perkebunan yang menghasilkan hasil-hasilnya, di lain pihak ada sektor pertanian tradisional yang hasil-hasilnya dikonsumsi sendiri. Sektor perkebunan dikuasai oleh orang-orang Eropa dan sektor yang memberi keuntungan tinggi. Sektor pertanian tradisional dikuasai oleh petani pribumi dan perkembangan sektor ini lambat.

Sistem perekonomian kolonial tidak melahirkan kelas tuan tanah pribumi. Tanah perkebunan dikuasai oleh pengusaha-pengusaha Belanda dan orang-orang Eropa lainnya. Tentu saja ini merupakan gambaran yang sangat sederhana tentang kelompok kelompok yang ada di dalam masyarakat saat itu (Budiman 1984).

Seperti diketahui Belanda adalah sebuah negara kecil. Untuk menguasai Hindia Belanda yang sangat luas, Belanda membutuhkan orang-orang lokal untuk membantu mereka memerintah. Para bangsawan Jawa kemudian dipergunakan untuk tujuan ini. Tetapi tentunya pemerintah kolonial Belanda harus hati-hati supaya bangsawan-bangsawan Jawa ini tidak terlalu kuat sehingga dapat melawan mereka. Untuk ini digunakan politik devide et impera, mengadu domba dan menguasai (Aziz & Prabaswara 2022). Yang diadu domba adalah sesama bangsawan di kerajaan-kerajaan Jawa. Belanda aktif sekali membantu bangsawan yang satu melawan bangsawan yang lain. Bila bangsawan yang dibantu menang, maka secara bersama mereka memerintah rakyat di Jawa. Belanda mengakui kekuasaan tradisional bangsawan Jawa ini, bahkan melindunginya (Rizaldin 2024). Sebagai imbalan, Belanda menguasai tanah beserta para petaninya yang bekerja untuk Belanda sebagai bentuk pembayaran pajak. Belanda memperoleh hasil tanah tersebut. Kelompok lain yang diadu adalah antara kaum pedagang dan kaum bangsawan. Para bangsawan memiliki kekuasaan politik tradisionalnya, tetapi tidak kekuatan ekonomi. Kalau orang-orang Jawa memperoleh juga kekuatan ekonomi, maka mereka bisa menjadi ancaman bagi kekuasaan pemerintah kolonial. Karena itu, Belanda berusaha mencegah munculnya kaum pedagang di kalangan orang-orang pribumi.

Di balik itu, munculnya kekuatan ekonomi para bupati pesisir di Jawa, mereka melakukan perdagangan dengan para pedagang yang datang dari mancanegara, menimbulkan kekawatiran bagi para bangsawan Jawa yang ada dipedalaman. Maka kekuasaan para bupati pesisir ini diserang dan dihancurkan (Hartono & Handinoto 2005). Akibat dari ini adalah tidak terbentuknya kelas borjuasi yang kuat pada jaman kolonial. Orang-orang Jawa khususnya dimana pengaruh

pemerintah kolonial sangat besar, lebih suka menjadi dibirokrat daripada pedagang. Kadang-kadang kegiatan perdagangan masih dianggap sebagai pekerjaan yang kurang terhormat, meski sikap itu kini telah bulai berubah (Budiman 1984).

### **Bourgeoise Kelas Menengah Pedagang Muslim di Jawa**

Kelas menengah (borjuis) yang mendekati ciri kelas menengah lama pada jaman pra revolusi industri di Eropa sebetulnya juga ditemukan dalam sejarah awal bangsa ini pada jaman kolonial Belanda awal abad ke-20. Seperti halnya di negara-negara sedang berkembang lainnya, proses perkembangan golongan menengah di Indonesia juga dipengaruhi perkembangan kolonialisme. Kolonialisme Belanda selalu mematikan kemunculan embrio kelas menengah atau borjuis pribumi yang mulai muncul di masyarakat, yang ada saat itu adalah pedagang samudera dan para pengrajin industri kecil (Bulkin 1984a). Apabila dilihat dari segi teoritis masyarakat Indonesia tidak memiliki suatu kelas menengah dalam artian yang sebenarnya, yaitu satu kelompok manusia Indonesia yang benar-benar merdeka dalam pandangan politik dan memiliki kekuatan ekonomi yang mandiri dan menentukan. Dari segi ini maka golongan menengah yang lahir saat kolonial Belanda bercokol di Indonesia hanyalah borjuis kapitalis semu suatu kelas menengah yang tidak murni.

Pada awal abad ke-20 memang ada jenis kelas menengah yakni kau pedagang dan pengrajin pribumi yang kemudian bergabung dengan Serikat Dagang Islam. Golongan inilah yang disebut oleh Muhammin (1984) sebagai tonggak kelas menengah (borjuis) seperti di Barat. Sebab kegiatan ekonomi dan politik mereka merupakan kekuatan pengontrol terhadap pemerintah kolonial dan merupakan perwujudan dari nilai-nilai entrepreneurship dalam arti sebenarnya. Tetapi kelas menengah muslim ini tidak dapat bertahan cukup lama hanya sampai Indonesia merdeka, walaupun kini masih nampak bekas-bekasnya. Mereka tergantikan oleh kelompok Cina.

Sebagai contoh dari kelahiran borjuis pedagang pribumi adalah komunitas masyarakat Kudus kulon. Seperti diketahui bahwa Kudus

merupakan suatu kota di Jawa Tengah utara tempat tumbuhnya pabrik-pabrik rokok. Pemilihan nama Kudus Al Quds artinya suci yang kemungkinan dikarenakan bahwa kota ini sejak lama telah menjadi pusat beberapa agama, yang kemudian diubah oleh Wali untuk menunjukkan bahwa Islam telah mendominasi wilayah ini. Penduduk kota Kudus seperti layaknya kota-kota lain di Jawa memiliki variasi hidup keagamaan yang bermacam-macam. Kenyataan ini terlihat dengan adanya beberapa daerah tertentu yang didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu. Kawasan Kudus Barat yang terkenal dengan nama Kudus Kulon tempat makam para wali dan ulama mayoritas penduduknya terdiri dari para santri atau komunitas yang betul-betul membuktikan dirinya sebagai orang Islam dan senantiasa berusaha hidup sesuai dengan ajaran-ajaran Islam murni. Mayoritas masyarakat Kudus Kulon berprofesi sebagai pedagang yang sukses sebelum Indonesia merdeka dan dari wilayah inilah lahir raja kretek Nitisemito yang sangat terkenal itu. Kudus Kulon ini merupakan kota lama Kudus yang dibentuk oleh Sunan Kudus setelah dia menyingkir dari Demak akibat perseteruannya dengan Sunan Kalijaga. Kudus Timur merupakan wilayah yang heterogen. Di wilayah ini banyak hidup orang Cina, Kristen dan kebanyakan adalah kelas abangan. Kudus Kulon merupakan basis kuat pendukung partai Islam Masyumi. Sedangkan Kudus Timur merupakan basis pendukung dua partai nonIslam yaitu PKI dan PNI. Keadaan ini nampak dalam Pemilu 1955 (Castles 1967).

Castles (1967) menyatakan bahwa diantara pengusaha-pengusaha sukses pribumi sering dihubungkan dengan santri-santri dari Kudus Kulon. Karakteristik yang menarik, yang diberikan kepada mereka antara lain: mereka adalah pengusaha-pengusaha yang memiliki sikap sederhana, sanggup bekerja keras, usahawan yang cekatan dan terutama sekali adalah santri-santri yang salehd alam beribadah. Meskipun kebanyakan mereka dididik di sekolah-sekolah Islam tradisional, mereka cenderung berkembang menjadi bangsawan borjus yang sadar akan dirinya, yang berbeda dengan pegawai dan golongan elite Islam lain di kota Kudus.

Kemunculan komunitas Kudus Kulon dapat dijelaskan bahwa politik Sunan Kudus, yang tetap

ingin mempertahankan pesisir sebagai hegemoni kekuasaan telah mengalami kekalahan dengan dipindahkannya kerajaan Demak ke pedalaman. Hal ini mendorong Sunan Kudus untuk meninggalkan demak dan membentuk suatu komunitas tersendiri yaitu yang kemudian dikenal dengan nama Kudus Kulon. Peristiwa seperti ini dipandang sebagai gaya hidup alternatif dari Sunan Kudus akibat kekalahan politiknya. Walaupun begitu Sunan Kudus tidak dapat melahirkan bentuk konsolidasi baru yaitu bersatunya perdagangan, agama, dan kekuasaan secara sekaligus. Karena perdagangan pantai sendiri telah lenyap, dan konsolidasi politik sendiri jelas kalah oleh kekuatan pajang. Maka mekahirkan komunitas agama dan niaga di daratan adalah alternatif terakhir.

Graaf (1985) mengatakan bahwa mengenai menetapnya penghulu Demak (yang dimaksud Sunan Kudus) yang menyingkir ke tempat-tempat kelompok kecil penduduk yang menghuni pedukuhan pada jalan lama menuju arah Timur (yang dimaksud adalah Kudus Kulon sekarang), mereka dapat bertahan hidup karena memperoleh penghasilan dari ladang di sekitarnya dan mulai merintis perdagangan yang dikelola oleh pengikut yang setia ketika Sunan Kudus menjadi panglima perang dan pengikut Majapahit yang dulu ditaklukkan. Boleh jadi ada kelompok yang mengikuti Sunan Kudus, ini dapat dimengerti bahwa sebagian barisan santri yang bertempur di bawah Sunan Kudus melawan Wirasaba ikut juga bersama Sunan Kudus di dalam membentuk komunitas baru (Sardjono et al. 2015).

Wilayah yang dibentuk oleh Sunan Kudus ini telah menjadi kota lama yang biasa disebut Kudus Kulon oleh masyarakat Kudus. Kehidupan masyarakat Kudus Kulon hingga kini masih cukup ekslusif dan berbeda dengan masyarakat Kudus pada umumnya. Kudus Kulon besar menyimpan semangat dagang yang baik dan etos kerja yang tinggi mereka melihat bahwa bekerja itu sebagai ibadah, terbukti bahwa di masa lalu komunitas masyarakat Kudus Kulon adalah masyarakat yang kaya, apabila dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Menentukan kalau masyarakat Kudus Kulon adalah masyarakat yang kaya adalah sangat mudah dengan mengamati perkampungan

dan rumah-rumah mereka yang nampak akan kekayaannya itu (Sardjono et al. 2015).

Masyarakat Kudus Kulon memang mandiri di bidang perekonomian mereka bekerja di bidang tenun, batik, perhiasan, barang antik, bordir, tembakau, pabrik tegel, dan pertokoan serta pabrik rokok kretek (Ihsan 2018). Seperti diketahui pada awal abad 20 kota Kudus mulai terkenal dengan industri rokoknya. Kelahiran industri rokok dapat dihubungkan dengan borjuis santri Jawa yang kuat modalnya karena berdagang kerajinan rumah tangga. Semangat dagang yang tinggi biasanya muncul karena berbagai tantangan, harapan, kemungkinan yang menarik, jadi situasi dimana masyarakat bekerja dengan rajin, teliti, dedikasi dan ras atanggung jawab. Keadaan ini sudah terbentuk sejak Sunan Kudus membentuk wilayah itu. Maka boleh dikatakan bahwa pada awalnya masyarakat Kudus Kulon telah memiliki dasar dalam mentalitas yang sejak semula sudah cukup memadai (Bastomi 2019). Pergerakan dan perjalanan sejarah yang panjang dalam bentuk pergolakan-pergolakan politik jaman kerajaan Demak, kondisi sosiokultural cukup menyediakan ruang gerak mereka sebagai masyarakat oposan. Komunitas Kudus Kulon, tidak terbentuk oleh status Quo, atau rutinitas dalam kehidupan sosial politik yang bersifat mantap dan cenderung konservatif.

Masyarakat Kudus Kulon selalu membentuk counter concept terhadap dominasi kerajaan pedalaman pada masa kolonial, mereka juga menciptakan model semacam ini sebagai lawan bagi pemerintah Belanda (Zamzami 2018). Maka kemunculan etos dagang bagi masyarakat Kudus Kulon adalah suatu karakter yang harus menjadi watak pelakunya. Sunan Kudus memang arsitek yang lahir sebagai tokoh yang inovatif, berpandangan ke depan yang kadang kala menyimpang dari patokan-patokan yang berlaku sebagai tokoh pembangkang dan termasuk pada kelompok yang ditolak. Sunan Kudus merasa sebagai pemimpin kelompok sosial yang tujuan dan nilai-nilai hidup kelompoknya tidak diakui secara adil oleh kelompok-kelompok lain (Castles 1967).

Bahkan menurut Geertz dalam setiap bukunya selalu menyatakan adanya kaitan yang kuat antara unsur duniawi dan unsur rohani. Dalam

hubungan ini Geertz (1986) menafsirkan adanya keseimbangan antara mengejar kepentingan duniawi dengan nilai kebajikan agama Islam. Penafsiran ini justru banyak dijalankan oleh Islam reformis di kalangan pedagang Islam, terutama di belahan pesisir utara Jawa. Oleh karena itu konsepsi dari Clifford Geertz membenarkan adanya hubungan historis dan fungsional antara Islam dengan perdagangan. Pendapat-pendapat ini terutama termuat dalam bukunya "Mojokuto".

Di Mojokuto, muncul suatu proses pertumbuhan dari nilai-nilai baru semacam economic ethic, yang pernah dikemukakan oleh Weber, yang memberi keleluasaan pada ekonomi yang lebih rasional untuk memainkan peran dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan peneliti lain, Nakamura (2012) dengan lokasi penelitian kota Gede ternyata mempunyai watak tersendiri. Kemunculan reformisme Islam yang lahir dari masyarakat itu sendiri yang pada mulanya sepenuhnya berisi tradisi agama yang sangat sinkretis. Para wirausahawan di sana sebelum Muhammadiyah datang adalah para pedagang yang bukan santri. Walauun begitu tidak dapat dipungkiri bahwa pernah terjadi proses simetris dan saling mendukung antara pertumbuhan satu pihak dengan Islam di pihak lain. Tetapi proses ini berakhir bersama jatuhnya kolonialisme Belanda pada 1942. Perang revolusi dan lintang pukang politik telah menghilangkan kesempatan para entrepreneur merebut kembali tingkat kekuatan ekonomi sebelum revolusi. Karena Islam memang tidak membawa keseragaman bentuk di Indonesia.

Pandangan (Geertz 1960) kelompok Islam santri inilah yang paling potensial dan memiliki nilai-nilai tertentu mengembangkan diri menjadi golongan entrepreneur yang kuat dan mandiri. Golongan ini diharapkan menjadi inti kelas menengah borjuis Jawa yang amat diperlukan untuk pembangunan dan pembaharuan sosial, ekonomi, politik serta kebudayaan. Tetapi pada kenyataannya kalau dilihat sejarah perkembangan kelas menengah di Indonesia sesudah kemerdekaan, maka yang berkembang menjadi kelas menengah borjuis pribumi Jawa adalah dari kalangan birokrat, yang menurut konsep Weberian mereka tidak mempunyai nilai-nilai kultural yang diperlukan sebagai entrepreneur.

## Masa Orde Baru

Sangat meyakinkan, bahwa sejak sebelum kemerdekaan sampai dengan akhir dengan dekade enampuluhan, kelas menengah pedagang muslim atau juga para wirausahawan santri relatif mendominasi dunia perdagangan di negeri ini. Begitu dominannya sehingga banyak peneliti semacam Geertz (1960), seperti pernah disinggung di atas, seorang antropolog yang terkenal dengan teorinya abangan santri, dan priyayi, dalam masyarakat Jawa itu. Clifford Geertz senantiasa melekatkan aktivitas perdagangan dengan kelompok santri. Sehingga dapat dikatakan bahwa kalau priyayi senantiasa mendominasi sektor kepegawaian negara, dan abangan itu mendominasi sektor pertanian, sedangkan kelompok santri itu mendominasi kelompok dunia usaha.

Nakamura, juga seorang antropolog, dalam bukunya “the Crescent Arises over The Banyan Tree”, menyatakan bahwa pusat-pusat kaum di bagian bagian kota yang biasanya disebut kauman yang terdapat di kota-kota di Jawa ini, senantiasa juga menjadi pusat pusat perdagangan dan industri. Kantung kantung santri yang tinggal di Kudus, Pekajangan, Laweyan, dan kajen, Kota Gede dan yang lainnya, itu terkenal memiliki semangat dagang yang militan, dengan etos kerja yang tinggi, yang selalu menggeluti bidang perdagangan dan perniagaan. Muhaimin (1991), sarjana politik yang sempat melejit namanya lewat kasus buku nya yang berjudul “Bisnis dan politik” (1991), buku ini menemukan bahwa di Jawa ada beberapa bagian daerah basis entrepreneur yang kegiatan ekonominya sangat dinamis, yaitu daerah-daerah yang beranggotakan golongan masyarakat golongan santri. Daerah daerah tersebut misalnya pekajangan, kota Gede dan karang kajen.

Pada masa Orde Baru, hampir semua pedagang dan pengusaha yang berasal dari kalangan abangan dan priyayi tumbuh serta bergerak di sektor-sektor yang “berlemak”, tidak kompetitif dan tidak mengandung resiko dan mendapat perlindungan dari pemerintah. Di samping itu umumnya mereka berkembang karena didukung fasilitas politik atau oleh keahlian entrepreneurship golongan lain (Untarawati 2024). Golongan borjuis kelas menengah

pedagang muslim Jawa sempat jaya di awal abad ke-20, di masa Orde Baru hanya tersisa kecil saja yang dapat bertahan dan berkiprah pada tingkat nasional dengan kekuatan sendiri. Dari sini hanya tersisa sejumlah kecil saja yang dapat bertahan dan dapat dikatakan bahwa asumsi Geertz (1963) dalam bukunya di lapangan telah menemukan kenyataan yang berlainan. Sebab yang menjadi penggerak pertumbuhan serta perubahan ekonomi dan sosial paling tidak dalam jangka pendek adalah bukan kelas menengah borjuis pribumi muslim seperti yang dikatakan Geertz tetapi kelas menengah borjuis pribumi muslim yang kadar independensinya amat lemah serta terbatas.

Pada masa Orde baru, hambatan pertumbuhan dan pengembangan usaha kelas menengah dari santri, bukan sekedar nilai kultural yang patrimonial, sistem “bazaar” yang tidak rasional dan tidak memungkinkan golongan santri bersaing melawan kekuatan asing multinasional maupun kekuatan sektor negara serta swasta yang mendapat hak monopoli (Muhaimin 1984). Namun potret borjuis kelas menengah seperti itu mulai sedikit berubah ketika rezim Orde Baru mulai goyah oleh gelombang reformasi pada awal 1988. Kelas profesional dan pro status quo seolah tidak ketinggalan untuk melakukan aksi bagaimana terlihat pada detik-detik terakhir kekuasaan Orde Baru. Ketika mulai terkuaknya era reformasi, dimana iklim kebebasan dan keterbukaan relatif lebih baik daripada sebelumnya. Tesis-tesis perubahan tentang borjuis kelas menengah dipastikan akan muncul ke permukaan. Apakah iklim yang sudah berubah itu membawa pada pertumbuhan dan perubahan pada kelas menengah akan menjadi lebih kuat, mandiri, dan independen karena kooptasi kekuasaan rezim Orde Baru telah menghilang. Seperti diketahui bahwa mandulnya kelas menengah dewasa ini bukan saja karena adanya kooptasi kekuasaan, juga karena faktor budaya patrimonial yang masih begitu kuat. Pejabat birokrasi tidak ubahnya seperti Patron dan masyarakat adalah Client. Hubungan keduanya tidak didasarkan pada rasionalitas birokrasi modern tetapi lebih pada hubungan personal dengan pejabat yang bersangkutan. Karena itu, eksistensi kelas menengah tidak semata-mata ditentukan oleh dirinya sendiri tetapi juga oleh

budaya politik yang melingkupinya (Untarawati 2024).

Sampai sekarang ini keberadaan kelas menengah atau kelas borjuis seperti di Barat untuk Indonesia masih seperti ruang kosong yang masih belum menemukan format jawaban yang pasti. Beragam pendekatan serta skenario yang mengikutinya telah dikemukakan untuk mencoba memecahkan teka-teki tentang kelas menengah tersebut. Namun demikian, kelas menengah tetap menjadi sesuatu yang absurd dan masih menampakkan dirinya yang samar.

Perkembangan kelas menengah borjuis pribumi Jawa tidak normal, karena di jaman kolonialisme Belanda bercokol di Indonesia, kaum pribumi hanya diberi peranan sekunder bahkan kalau bisa dihabisi. Sementara di lapangan ekonomi peranan diberikan kepada kelas Tionghoa. Hanya beberapa saja yang sempat mencuat seperti di Kudus Kulon, Pekajangan dan Kota Gede. Pada masa setelah Indonesia merdeka kelas menengah borjuis pribumi dari pedagang muslim tidak ada yang menghasilkan kelas wirausaha yang kuat, sedangkan jaringan yang kuat adalah antara pengusaha dengan penguasa Orde Baru (Untarawati, 2024). Justru anak-anak borjuis pribumi pedagang muslim beralih menjadi birokrat atau profesional setelah mengenyam pendidikan tinggi.

### Runtuhnya Kerajaan Bisnis Nitisemito

Keruntuhan kerajaan rokok Nitisemito di Kudus merupakan fenomena yang menggambarkan kompleksitas dinamika sukses dalam perusahaan keluarga yang beroperasi dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik Indonesia masa kolonial dan pascakolonial. Nitisemito, seorang pengusaha pribumi yang berhasil menggabungkan inovasi teknologi mesin industri dengan strategi pemasaran kreatif, mampu membangun monumen bisnis rokok kretek besar dan berpengaruh. Namun demikian, setelah wafatnya pada 1953, keberlanjutan bisnis ini menghadapi hambatan serius, terutama dalam peralihan kepemimpinan perusahaan yang tidak efektif di generasi penerusnya. Studi (Nurwanti 2009) mengindikasikan bahwa faktor internal keluarga, seperti konflik dan ketidaksiapan generasi

pengantinya, serta tekanan dari rezim kolonial, menjadi faktor utama keruntuhan sisa kejayaan perusahaan tersebut.

Dalam kajian sosial ekonomi Indonesia kolonial awal abad ke-20, kelas menengah Muslim memainkan peran vital meskipun keberadaannya relatif terbatas. Berdasarkan pengamatan (Jati 2016) dan (Syafaah 2018), kelas borjuis pribumi terdiri dari birokrat tingkat menengah seperti lurah dan bupati yang dicengkeram oleh sistem kolonial Belanda. Mereka juga dibatasi oleh kebijakan yang menghilangkan opsi kepemilikan tanah dan kewenangan ekonomi. Kondisi ini menciptakan stagnasi dalam perkembangan kelas menengah pribumi, khususnya dalam bisnis dan kewirausahaan pribumi. Namun, munculnya tokoh-tokoh seperti Nitisemito menggambarkan adanya pengecualian bagi pemahaman tentang kelas menengah Muslim jaman kolonial tersebut.

Menurut pandangan (Robison 2009), kelas menengah pribumi, termasuk pengusaha santri Muslim. Kelompok ini menghadapi tekanan kuat monopoli ekonomi dari pengusaha Tionghoa dan kendali pemerintah kolonial. Pendekatan Weberian menawarkan kerangka teoritik yang menekankan bahwa transformasi sosial dan ekonomi tercermin melalui posisi kelas menengah dalam pasar, pendapatan, dan hak kepemilikan, yang dipengaruhi oleh hubungan kultural dan struktural. Nitisemito, berhasil menembus dominasi ini, sekaligus menunjukkan keterbatasan yang melekat dalam sistem sosial kolonial. Namun, ketidakmampuan generasi penerusnya untuk melanjutkan keberhasilan usaha menghentikan kontinuitas bisnis keluarga.

Akar historis Kudus Kulon sebagai sebuah kota Muslim santri yang aktif secara ekonomi dapat dipahami dalam mengkaji kesuksesan dan kegagalan kerajaan rokok Nitisemito. Graaf (1985) dan Castles (1967) mengemukakan bahwa kota ini pernah menjadi pusat perdagangan Islam sejak masa awal kolonial. Etos kerja yang tinggi, dikombinasikan dengan nilai-nilai agama dan budaya santri, menciptakan modal sosial yang mendukung perkembangan usaha-usaha kecil sampai menengah. Nitisemito memanfaatkan modal sosial ini serta inovasi teknologi untuk mencapai keberhasilan bisnis dan mengubah wajah

Kudus Kulon sebagai arena kontestasi kelas dan ekonomi yang unik.

Namun, seperti yang diungkapkan oleh Mahasin (1998) dan Untarawati (2024), kelas menengah Muslim ini tidak berhasil bertransformasi menjadi kelas borjuis yang mandiri dan berkelanjutan pada masa pascakolonial dan Orde Baru. Kondisi sosio-politik saat itu, termasuk kebijakan ekonomi yang berpihak pada birokrat dan pengusaha pro-pemerintah, serta sistem ekonomi rente dan nepotisme, menghambat perkembangan wirausaha tradisional. Konsep pemborjuisian anak-anak santri atau priayisisasi santri yang diarahkan ke birokrasi menyiratkan penyerahan potensi kewirausahaan ke ranah pemerintahan, bukan dunia bisnis. Hal ini berimplikasi langsung terhadap lemahnya kelanjutan penerus perusahaan keluarga seperti milik Nitisemito.

Geertz (1960, 1986) melalui kajian etnografi di Mojokuto dan kota-kota lain di Jawa, menegaskan adanya hubungan antara nilai agama Islam santri dengan etos kerja dan praktik ekonomi. Ia menyatakan bahwa santri berpotensi menjadi inti kelas menengah yang mandiri dan ulet berwirausaha. Namun, realitas empiris di Kudus dan wilayah lain menunjukkan adanya kegagalan transformasi kelas menengah Muslim ini menjadi kekuatan ekonomi modern. Hal ini terutama terjadi karena tekanan struktural kolonial dan pragmatisme ekonomi nasional pascakolonial yang tidak mengakomodasi bisnis tradisional untuk berkembang secara optimal.

Selanjutnya, keruntuhan kerajaan Nitisemito juga dapat ditafsirkan sebagai refleksi dari kegagalan pembentukan kelas borjuasi pribumi yang kuat selama masa kolonial dan pascakolonial, seperti dijelaskan oleh Budiman (1984) dan Aziz & Prabaswara (2022). Pemerintah kolonial secara sengaja merekayasa struktur sosial politik dengan menerapkan politik *divide et impera* terhadap kelas penguasa lokal dan pedagang pribumi untuk mencegah munculnya ancaman ekonomi dan politik terhadap dominasi kolonial. Hal ini menimbulkan dualisme yang melukai potensi perkembangan kelas menengah Muslim sebagai agen ekonomi yang mandiri.

Keunikan komunitas Kudus Kulon sebagai basis kelas menengah Muslim dan pengusaha santri

memberikan gambaran bahwa inisiatif sosial budaya dan ekonomi dapat menghasilkan oposisi terhadap pemerintah kolonial. Namun, sebagaimana dijelaskan oleh Nakamura (2012) dan Muhammin (1991), kekuatan dan pengaruh kelompok ini masih terbatas dan mudah tergerus oleh arus perubahan politik dan ekonomi nasional, terutama pada masa revolusi dan Orde Baru. Transformasi politik dan ekonomi yang seringkali eksklusi membawa dampak negatif terhadap kesinambungan bisnis keluarga Nitisemito.

Di masa Orde Baru, seperti diuraikan oleh Untarawati (2024), kelas menengah Muslim tradisional menghadapi tekanan sistemik dari kebijakan pemerintah yang mendukung oligarki birokrasi dan kelompok bisnis yang berafiliasi dengan pemerintahan. Sistem ekonomi rente dan kolusi memperkuat monopoli modal dan menghambat pertumbuhan kewirausahaan independen. Dampaknya keberadaan kelas menengah Muslim yang mandiri menjadi sangat terbatas dan banyak yang berubah haluan ke karir birokrasi atau profesional, sehingga memperkecil peluang kelangsungan kerajaan bisnis keluarga seperti bisnis Nitisemito.

## Simpulan

Nitisemito kerap disebut sebagai "Raja Kretek" oleh media massa. Hingga kini namanya masih sering muncul dalam surat kabar, majalah, dan media elektronik, meskipun ia telah lama wafat. Hal ini menunjukkan bahwa Nitisemito menjadi kebanggaan dan simbol keberhasilan wirausaha bumiputra, serta layak dipandang sebagai *local hero* bagi masyarakat Kota Kudus. Pembangunan ekonomi Kudus banyak ditopang oleh sejarah dan tradisi kewirausahaan masyarakatnya sendiri, salah satunya melalui keteladanan semangat dagang Nitisemito yang kuat dan visioner. Oleh karena itu, masyarakat Kudus yang ingin terus berkembang secara ekonomi seharusnya mampu mengambil pelajaran dari perjalanan hidup dan kejayaan perusahaan rokok M. Nitisemito. Tidak adanya keberlanjutan usaha keluarga Nitisemito menjadi refleksi penting bahwa perusahaan keluarga harus mempersiapkan proses kaderisasi kepemimpinan yang didukung penuh oleh seluruh anggota keluarga. Kaderisasi tersebut idealnya

mempertimbangkan kemampuan, pendidikan, dan pengalaman agar keberlangsungan perusahaan dapat terjamin.

## Referensi

- Abdullah, T. 1982. *Agama, Etos Kerja, dan Perkembangan Ekonomi*. LP3ES.
- Aina, Q. 2018. "Membaca Kelas Menengah Muslim Indonesia." *Jurnal Politik* 3(2). <https://doi.org/10.7454/jp.v3i2.1091>.
- Akhmad, N. M., dan Yuliaty. 2022. "Pengaruh Peralihan Kekuasaan Industri Rokok di Kudus hingga Modernisasi Industri Rokok Kudus Tahun 1918–1964." *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHI3S)* 2(10): 945–952. <https://doi.org/10.17977/um063v2i102022p945-952>.
- Alie, C. P., dan D. Suwandono. 2013. "Pengaruh Perkembangan Perkotaan terhadap Morfologi Kampung Kauman Kota Semarang." *Jurnal Ruang* 1(1): 151–160.
- Aziz, M. R., dan S. S. Prabaswara. 2022. "Divide et Impera in the Banten Sultanate: The Political Succession of Sultan Haji and VOC's Pepper Monopoly in the 17th and 18th Centuries." *Sunan Kalijaga: International Journal of Islamic Civilization* 5(2): 130–152.
- Bastomi, H. 2019. "Filosofi Gusjigang dalam Dakwah Pengembangan Masyarakat Kudus." *Community Development: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 3.
- Budiman, A. 1984. *Demokrasi Kelas Menengah Indonesia*. Kompas.
- Bulkin, F. 1984a. *Kapitalisme, Golongan Menengah dan Negara: Sebuah Catatan Penelitian*.
- Bulkin, F. 1984b. "Negara, Masyarakat dan Ekonomi." *Prisma* 8.
- Burger, D. H. 1983. *Perubahan-perubahan Struktur dalam Masyarakat Jawa*. Bharata Karya Aksara.
- Castles, L. 1967. *Religion, Politics, and Economic Behavior in Java: The Kudus Cigarette Industry*. Southeast Asian Studies, Yale University.
- Geertz, C. 1960. *The Religion of Java*. University of Chicago.
- Geertz, C. 1963. *Peddlers and Princess: Social Change and Economic Modernization in Two Indonesian Towns*. University of Chicago Press.
- Geertz, C. 1986. *Mojokuto: Dinamika Sosial Sebuah Kota di Jawa*. PT. Pustaka Grafiti Pers.
- Gottschalk, L. 2006. *Mengerti Sejarah*. UI Press.
- Graaf, D. 1985. *Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa*. Terj. Pustaka Grafiti Pers dan KITLV. PT. Pustaka Grafiti Pers.
- Hana, M. Y. 2018. "Dinamika Sosio-Ekonomi Pedagang Santri dalam Mengembangkan Industri Kretek di Kudus, 1912–1930." *JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam* 2(1): 15–35 <http://dx.doi.org/10.30829/j.v2i1.1420>
- Hartono, S., dan Handinoto. 2005. "Alun-Alun dan Revitalisasi Identitas Kota Tuban." *Dimensi Teknik Arsitektur* 33(1). <http://puslit.petra.ac.id/~puslit/journals/>.
- Ihsan, M. 2018. "Gusjigang: Karakter Kemandirian Masyarakat Kudus Menghadapi Industrialisasi." *Iqtishadia* 10(2): 153. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v10i2.2862>.
- Jahar, A. S. 2015. "Transformasi Gerakan Ekonomi Islam Kontemporer." *Miqot* 39(2). 319–340 <http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v39i2.28>
- Jati, W. R. 2015. "Tinjauan Buku Rekonfigurasi Politik Kelas Menengah Indonesia." 41(2): 11–12. <https://doi.org/10.14203/jmi.v41i2.257>
- Jati, W. R. 2016. "Kelas Menengah dalam Bingkai Middle Indonesia." *Jurnal Politik* 1(2). <https://doi.org/10.7454/jp.v1i2.1125>.
- Jonge, H. de. 1989. *Agama, Kebudayaan, dan Ekonomi: Studi Interdisipliner Tentang Masyarakat Madura*. Rajawali Press.
- Kuntowijoyo. 1985. *Muslim Kelas Menengah di Indonesia dalam Mencari Identitas 1910–1950*. Prisma.

- Kurniawan, G. F., Warto, dan L. A. Sutimin. 2019. "Dominasi Orang-Orang Besar dalam Sejarah Indonesia: Kritik Politik Historiografi dan Politik Ingatan." *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 4(1): 36–52.
- Magnis Suseno, F. 1999. *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mahasin, A. 1998. *Priyayisasi Santri*. Himmah.
- Mughits, A. 2004. "Berakhirnya Mitos Dikotomi Santri-Abangan." *Millah* Iii(2). <https://journal.uii.ac.id/Millah/article/view/7024>
- Muhamin, Y. 1984. "Politik Penguasa Nasional dan Kelas Menengah Indonesia." *Prisma*.
- Muhamin, Y. 1991. *Bisnis dan Politik: Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950–1980*. Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Muntholib, A. 2008. "Melacak Akar Rasialisme di Indonesia dalam Perspektif Historis." *Forum Ilmu Sosial* 35.
- Mutiara, T. D., dan S. M. Purwaningsih. 2016. "Suikersyndicaat Hindia Belanda 1870–1941." *Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah* 4(3): 656–663. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/15602>
- Muttaqin, H. 2011. "Perkembangan Etiket Batik di Kauman Surakarta Tahun 1950–1970." *Dewa Ruci* 7.
- Nakamura, M. 2012. *The Crescent Arises over the Bayan Tree: A Study of Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town, 1910–2010*. ISEAS Press.
- Nitisemito, A. S. 1980. *Raja Kretek Nitisemito*.
- Nurjanah, F., dan A. Saputra. 2021. "Strategi Spasial Kalangan Tionghoa di Kauman Surakarta." *Jurnal Arsitektur NALARs* 20(1).
- Nurwanti, Y. H. 2009. "Eksistensi Industri Rokok Kretek Kudus: Tjap Bal Tiga Hm. Nitisemito dalam Lintasan Sejarah." *Jantra* IV(8). <http://www.bpsnt-jogja.info>.
- Post, P. 1996. "The Formation of the Pribumi Business Élites in Indonesia, 1930s–1940s." *Bijdragen Tot de Taal Land-En Volkenkunde* 152: 609–632. <https://www.jstor.org/stable/27864798>
- Prayoga, K., J. Mariyono, dan A. Firdauzi. 2025. "De Kretek Konning from Kudus: H. M. Nitisemito's Business Mindset and Strategy against Foreign Business Hegemony in the Dutch East Indies." *Multidisciplinary Science Journal* 7(8): 2025359. <https://doi.org/10.31893/multiscience.2025359>.
- Rizaldin, I. 2024. "Empat Pejabat Tinggi Pesisir: Relasi Ingabehi Wangsareja dengan Mataram dan VOC pada Pertengahan Abad ke-17." *ESTORIA* 5(1).
- Robison, R. 2009. *Indonesia: The Rise of Capital*. Equinox Publishing.
- Sardjono, A. B., S. Nugroho, dan D. E. Prianto. 2015. "Ruang Dagang di Kota Lama Kudus." *Modul* 15(1): 1–12. <https://doi.org/10.14710/mdl.15.1.2015.1-12>
- Sobary, M. 2007. *Kesalehan Sosial*. LkiS.
- Soedarmono. 1987. "Munculnya Kelompok Pengusaha Batik di Laweyan pada Abad XX."
- Sonhaji, M., dan F. H. Maulida. 2020. "Komunikasi Politik dan Kecenderungan Pilihan Partai Kaum Santri dan Abangan pada Pemilu 1955." *Nimak: Journal of Communication* 4. <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/nyimak>.
- Supratno, E. 2023. "Pers dan Penyebaran Benih Nasionalisme: Filantropi Pengusaha Rokok Kretek Kudus untuk Pers Bumiputera Masa Kolonial." *Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah* 14(1).
- Syafaah, A. 2018. "Kelas Sosial dalam Sistem Landelijk Stelsel Masa Raffles (1811–1816)." *Tamaddum* 6(1): 133–46. <http://dx.doi.org/10.24235/tamaddun.v6i1.3252>
- Tanter, R., dan K. Young. 1996. *Politik Kelas Menengah Indonesia*. LP3ES.
- Untarawati, D. 2024. "Kronisme, Korupsi, dan Militerisme di Era Orde Baru." *Indonesian Journal of History and Islamic Civilization* 1.

- Weber, M. 2006. *Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme*. Pustaka Pelajar.
- Wibowo, G. A. 2011. "Pendidikan dan Perubahan Sosial di Mangkunegaran Surakarta 1912–1940." *Agastya* 1(2).
- Widiyanta, D. 2010. "Keberadaan Etnis Cina dan Pengaruhnya dalam Perekonomian di Asia Tenggara." *Mozaik* V(1).
- Yuliati, D. 2018. "Nasionalisme Buruh versus Kolonialisme: Suatu Kajian tentang Gerakan Buruh di Semarang pada Awal Abad XX." *ANUVA* 2(2): 213–224.  
<https://doi.org/10.14710/anuva.2.2.213-224>
- Zamzami, R. 2018. "Sejarah Agama Islam di Kerajaan Mataram pada Masa Panembahan Senapati, 1584–1601." *JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam* 2(2): 154-165.  
<http://dx.doi.org/10.30829/j.v2i2.1519>